



RENCANA KERJA

Tahun 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN TASIKMALAYA**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Jln. Sukapura III Singaparna Tasikmalaya
Telp/Fax. (0265) 2553101 email : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor: *KV.07.01/KP.07/ADPMPTSPTK/2024*

Lampiran: 1 (Satu) Lembar

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja);
 - b. bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan Renja perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dalam menyiapkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal Maret 2024



KEPALA DINAS,

DR. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : /DPMPTSPTK/2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya
Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya
Sekretaris : Perencanaan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya
Anggota : 1. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya
2. Kepala Bidang Perizinan Berusaha dan Non perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya
3. Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.

5. Pelaksana Perencanaan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.



KEPALA DINAS,

dr. H. FAISAL SOPARIANTO, M.Si

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 untuk keselarasan program pembangunan daerah.

Renja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini sebagai pedoman pelaksanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Singaparna, 29 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tasikmalaya


ds. HUSAINI SOEPARIANTO, M.Si
Pimpinan Utama Muda

NIP. 19710409 200212 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PEDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA URUSAN PENANAMAN MODAL, URUSAN TENAGA KERJA DAN URUSAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi Tahun 2023 dan Capaian Renstra Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi.....	II-14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi	II-16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSPTK KABUPATEN TASIKMALAYA.....	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya.....	III-2
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSPTK KABUPATEN TASIKMALAYA.....	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi Tahun 2023 dan Prakiraan Capaian Tahun 2024	II-3
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya..	II-15
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya.....	II-18
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya	II-34
Tabel 3.1	Prioritas dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025.....	III-3
Tabel 3.2	Tujuan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya	III-3
Tabel 3.3	Sasaran DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya	III-4
Tabel 3.4	Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dan perkiraan maju 2025	III-6
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya.....	IV-3
Tabel 4.2	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....	IV-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi perangkat daerah untuk memasukkan program, kegiatan dan subkegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025, serta merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah untuk mengetahui capaian kinerja Perangkat Daerah.

Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Renja ini akan menjadi bagian dari Renstra DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 61).
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;
19. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021–2026.
20. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 006 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 adalah panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025. Sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA URUSAN PENANAMAN MODAL, URUSAN TENAGA KERJA DAN URUSAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi Tahun 2023 dan Capaian Renstra Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSPTK KABUPATEN TASIKMALAYA

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DPMPTSPTK KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA URUSAN PENANAMAN MODAL, URUSAN
TENAGA KERJA DAN URUSAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi Tahun 2023 dan Capaian Renstra Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (tahun 2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
02.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	77 Poin	75,5	75,5	74,52	99%	75,5		
02.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89 Dokumen	14	9	9	100,00%	9		
02.18.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	18 Dokumen	3	3	3	100,00%	3	2	66,67%
02.18.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD DAN Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25 Laporan	0	-	-	0,00%	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (tahun 2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02.18.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	46 Laporan	22	6	6	100%	6	2	33,33%
02.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi keuangan	73 Bulan	28	14	14	100%	14	7	
02.18.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4380 Orang	1560	840	840	100%	840	420	50%
02.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian	60 Bulan	0	0	0	0,00%	0		
02.18.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti	25 Orang	0	0	0	0,00%	0		
02.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum	63 Bulan	15	12	12	100%	12	6	50%
02.18.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63 Bulan/Paket	15	12	12	100%	12	6	50%
02.18.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	63 Bulan / Paket	15	12	12	100%	12	6	50%
02.18.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen dan bahan bacaan perundangundangan yang di sediakan	63 Dokumen	15	12	12	100%	12	6	50%
02.18.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	60 Bulan/Laporan	0	0	0	0,00%	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (tahun 2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02.18.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	63 Laporan	15	12	12	100%	12	6	50%
02.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	64 Bulan	15	12	12	100,00%	12	6	50%
02.18.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	64 Laporan	15	12	12	100,00%	12	6	50%
02.18.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	64 Laporan	15	12	12	100,00%	12	6	50%
02.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	63 Bulan	15	12	12	100,00%	12	6	50%
02.18.01.2.09.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	34 Unit	34	34	34	100,00%	34	12	36,47%
02.18.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	3 Unit	3	3	3	100,00%	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (tahun 2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02.18.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	63 Unit	15	12	12	100,00%	12	6	50%
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kenaikan jumlah Investor	3%	308,33	0	0	0,00%	0		
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor								
2.18.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0	0	0	0,00%	0		
2.18.02.2.01.02	Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3 dokumen	0	0	0	0,00%	0		
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi	8 Dokumen	1	0	0	0,00%	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (tahun 2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0	0	0	0,00%	0		
2.18.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0	0	0	0,00%	0		
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	33 Pameran	0	0	0	0,00%	0		
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	33 Kegiatan	0	0	0	0,00%	0		
2.18.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	3 Dokumen	0	0	0	0,00%	0		
2.18.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	26 Dokumen	0	0	0	0,00%	0		
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang taat LKPM	20 Persen	74,46	12	74,46	620,50%	14		
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat LKPM	11 Pelaku Usaha	45	12	45	375,00%	10		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (tahun 2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	228 Kegiatan Usaha	47	40	84	210%	100	10	10%
2.18.05.2.01.02	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1098 Pelaku Usaha	454	238	238	100,00%	417	265	63,55%
2.18.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	470 Kegiatan Usaha	84	40	173	110,00%	55	25	45,45%
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	55 Jumlah Ijin	55	55	55	100%	55		
2.18.04.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	100 persen	100	100	100	100%	100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (tahun 2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.04.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	29364	2500	48057	1922%	30000	29968	99,98%
2.18.04.01.02	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	30 Kegiatan usaha	0	0	0	0%	0		
2.18.04.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	300 Pelaku usaha	0	0	0	0%	0		
2.18.04.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen							
02.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100%	0	0	0	0,00%	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (tahun 2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02.18.06.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	0	0	0	0,00%	0		
02.18.06.01.01	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5 Dokumen	0	0	0	0,00%	0		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	6848 Orang	1328	176	176	100%	1200		
2.07.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	6848 Orang	1328	176	176	100%	1200		
2.07.03.2.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	6848 Orang	1328	176	176	100%	1200		
2.07.03.2.01.01.03	Sub kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	4 Unit	0	0	0	0%	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (tahun 2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.07.04	Program _Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	20166 Orang	4301	3345	4301	130%	3345		
2.07.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan pembuatan kartu tanda bukti pencari kerja (AK.1)	72 Bulan	15	12	12	100%	12		
2.07.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan akad, akl dan ulb	20166 Orang	7648	3345	8249	246,60%	3345	5534	165,44%
2.07.04.2.01.05	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	6072 Orang	0	4968	4968	100%	4698		
2.07.02	Program _Perencanaan Tenaga Kera	Tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja	1 Dokumen	0	0	0	0,00%	0		
2.07.02.2.01	Kegiatan Penyusunan rencana tenaga kerja	jumlah dokumen rencana tenaga kerja	1 Dokumen	0	0	0	0,00%	0		
2.07.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan rencana tenaga kerja makro	jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	0	0	0	0,00%	0		
2.07.05	Program _Hubungan Industrial	Persentase kasus HI yang diselesaikan	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100%		
2.07.05.2.02	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus HI yang diselesaikan	100 Persen	100%	100%	100%	100,00%	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (tahun 2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.07.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perselisihan yang di cegah	6 perkara	0	0	0	0,00%	0		
2.07.05.2.02.02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	6 Perkara	2	1	1	100%	1		
2.07.05.2.02.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lks tripartit yang di bina	6 Lembaga	2	1	1	100%	1		
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah transmigran yang telah difasilitasi pembinaannya	200 orang	0	0	0	0,00%	0		
3.32.03.1.01	Kegiatan Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	200 orang	0	0	0	0,00%	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (tahun 2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.32.03.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	1	0	0	0,00%	0		
3.32.03.1.01.06	Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Lokal	jumlah calon transmigran dan/atau transmigran yang mendapatkan pelatihan	50 Orang	0	0	0	0,00%	0		
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	6 Paket	0	0	0	0,00%	0		
3.32.04.1.01	Kegiatan Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	6 Paket	0	0	0	0,00%	0		
3.32.04.1.01.02	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial,ekonomi dan kelembagaan	2 Pemukiman	0	0	0	0,00%	0		

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan review hasil evaluasi Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi pelaksanaan renja dan realisasi renstra sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang mencapai target 100% sebanyak 3 program.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 2 program.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja adalah meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada pelaku usaha mikro kecil (UMK), melakukan sosialisasi/bimbingan teknis kepada para pelaku UMK terkait kebijakan penanaman modal, kemitraan, Online Singel Submission (OSS) dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online, serta membangun Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mengurus berbagai macam perizinan dan nonperizinan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi

Berdasarkan Renstra DPMPSTPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 terkait Urusan Penanaman Modal terdapat 3 Indikator Kinerja Utama (IKU), dan terkait Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat 2 Indikator Kinerja Utama (IKU). Target indikator kinerja program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi
Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Satuan	Traget Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Nilai Reformasi Birokrasi			Skor	24,48 (Poin)	59 / CC	60,50/ B	63 / B	67 / B	70,2/B	46,74	61,79		63 / B	67 / B	
2	Nilai realisasi penanaman modal ikk		IKK	Rp. (juta)	145.456	80.000	82.400	84.872	87.418	90.041	211.553	446.296		84.872	87.418	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan			Skor	85,2	85,8	86	86,2	86,3	86,4	88,52	86,91		86,2	86,3	
4	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan ikk		IKK	Persen	27,08%	27,23%	27,38%	27,52%	27,67%	27,81%	29,99	31,74		27,52%	27,67%	
5	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ikk		IKK	Persen	2,92%	3,75%	4,58%	5,42%	6,25%	7,08%	12,82	13,67		5,42%	6,25%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya

DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal, urusan pemerintah bidang tenaga kerja dan urusan pemerintah bidang transmigrasi. Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, sudah menjadi tugas DPMPTSPTK untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan dengan permasalahan, antara lain pertumbuhan ekonomi melambat, peningkatan pengangguran, dan penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri dan jasa. Hal ini akan berdampak terhadap pencapaian berbagai sasaran pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka menengah.

Dalam tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan iklim investasi adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja akan berdampak bagi penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan. Undang-undang ini juga diklaim memberikan kemudahan untuk pelaku usaha terutama UMKM, membentuk ekosistem investasi yang kondusif, dan terciptanya lapangan kerja untuk mengakomodasi kebutuhan angkatan kerja.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya

akan terus melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dengan memanfaatkan faktor-faktor pendorong, hasil yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan jumlah investor dan realisasi investasi penanaman modal di Kabupaten Tasikmalaya;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, mempermudah dan mempercepat proses perizinan dengan menjalankan SP dan SOP yang telah disesuaikan dengan Online Single Submission (OSS);
3. Meningkatkan pemberian informasi perizinan dan penanaman modal, tidak hanya melalui tatapan langsung, tetapi juga menggunakan berbagai media, baik melalui media masa, televisi, maupun website dan layanan online;
4. Meningkatkan kesempatan kerja; dan
5. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan awal Renja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Isu strategis yang telah dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang terkait dengan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya adalah peningkatan iklim investasi, dengan prioritas pembangunan daerah Pengembangan Mall Pelayanan Publik.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tasikmalaya

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DPMPTSPT K				25.216.650.780	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DPMPTSPT K				25.216.650.780	
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.868.814.144	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.868.814.144	
1	Program Penunjang Urusan Pemeruntah Daerah		Nilai SAKIP	Poin	77	2.548.814.144	Program Penunjang Urusan Pemeruntah Daerah		Nilai SAKIP	Poin	77	2.548.814.144	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	dok	1	105.000.000	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	dok	1	105.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dok	3	75.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dok	3	75.000.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	6	30.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	6	30.000.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya layanan administrasi keuangan	Bulan	14	6.239.428.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya layanan administrasi keuangan	Bulan	14	6.239.428.000	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	60	6.239.428.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan	60	6.239.428.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian	bulan	-	-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian	bulan	-	-	
1.3.1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti	orang	-	-	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti	orang	-	-	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya administrasi umum	bulan	12	420.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya administrasi umum	bulan	12	420.000.000	
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan/ Paket	12	200.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan/ Paket	12	200.000.000	
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	bulan/ paket	12	140.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	bulan/ paket	12	140.000.000	
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah dokumen dan bahan bacaan perundangundangan yang disediakan	dokumen	12	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah dokumen dan bahan bacaan perundangundangan yang disediakan	dokumen	12	50.000.000	
1.4.4	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	bulan/ laporan	12	50.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	bulan/ laporan	12	50.000.000	
1.4.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12	320.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12	320.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	bulan	12	1.248.814.144	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	bulan	12	1.248.814.144	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sum berdaya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	394.414.144	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sum berdaya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	394.414.144	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	laporan	12	851.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	laporan	12	851.400.000	
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	880.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	880.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	34	470.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	34	470.000.000	
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	2	250.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	2	250.000.000	
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	12	160.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	12	160.000.000	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase kenaikan jumlah Investor	persen	3	445.000.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase kenaikan jumlah Investor	persen	3	445.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2,1	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yang bisa diberikan kepada investor	Pelaku Usaha	15	50.000.000	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yang bisa diberikan kepada investor	Pelaku Usaha	15	50.000.000	
2.1.1	Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	dok	23	55.000.000	Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	dok	23	55.000.000	
2,2	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah peta potensi investasi	dok	1	400.000.000	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah peta potensi investasi	dok	1	400.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	dok	1	200.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	dok	1	200.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.2.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	dok	1	200.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	dok	1	200.000.000	
3	Program Promosi Penanaman Modal		Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	dok	1	750.000.000	Program Promosi Penanaman Modal		Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	dok	1	750.000.000	
3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	dok	1	750.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	dok	1	750.000.000	
3.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dok	1	750.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dok	1	750.000.000	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal		Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	Pelaku Usaha	3500	420.000.000	Program Pelayanan Penanaman Modal		Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	Pelaku Usaha	3500	420.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	Pelaku Usaha	3500	420.000.000	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	Pelaku Usaha	3500	420.000.000	
4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	3500	300.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	3500	300.000.000	
4.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	3500	120.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	3500	120.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase pelaku usaha yang taat LKPM	persen	11	695.000.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase pelaku usaha yang taat LKPM	persen	11	695.000.000	
5.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha yang taat LKPM	Pelaku Usaha	11	695.000.000	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha yang taat LKPM	Pelaku Usaha	11	695.000.000	
5.1.1	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	50	220.000.000	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	50	220.000.000	
5.1.2	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan	Pelaku Usaha	300	275.000.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan	Pelaku Usaha	300	275.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				
5.1.3	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	50	200.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	50	200.000.000	
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					18.967.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					18.967.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7	Program Perencanaan Tenaga Kerja		Tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja	dok	1	200.000.000	Program Perencanaan Tenaga Kerja		Tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja	dok	1	200.000.000	
7.1	Kegiatan Penyusunan rencana tenaga kerja		jumlah dokumen rencana tenaga kerja	dok	1	200.000.000	Kegiatan Penyusunan rencana tenaga kerja		jumlah dokumen rencana tenaga kerja	dok	1	200.000.000	
7.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan rencana tenaga kerja makro		jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	dok	1	200.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan rencana tenaga kerja makro		jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	dok	1	200.000.000	
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja		Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	orang	1200	6.500.000.000	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja		Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	orang	1200	6.500.000.000	
8.1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah pencari kerja yang dilatih	orang	1200	6.450.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah pencari kerja yang dilatih	orang	1200	6.450.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	
8.1.1	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	orang	250	6.200.000.000	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	orang	250	6.200.000.000	
8.1.2	Sub kegiatan pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/kota		Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	unit	2	250.000.000	Sub kegiatan pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/ Kota		Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	unit	2	250.000.000	
8.2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	persen	100	50.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	persen	100	50.000.000	
8.2.1	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	lembaga	1	50.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	lembaga	1	50.000.000	
9	Program Penempatan Tenaga Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	orang	3409	11.817.836.636	Program Penempatan Tenaga Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	orang	3409	11.817.836.636	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	
9.1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelayanan pembuatan kartu tanda bukti pencari kerja (AK.1)	bulan	12	11.817.836.636	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya pelayanan pembuatan kartu tanda bukti pencari kerja (AK.1)	bulan	12	11.817.836.636	
9.1.1	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	orang	3377	500.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	orang	3377	500.000.000	
9.1.2	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja		jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	orang	4500	11.317.836.636	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja		jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	orang	4500	11.317.836.636	
10	Program Hubungan Industrial		Persentase kasus HI yang diselesaikan	persen	100	650.000.000	Program Hubungan Industrial		Persentase kasus HI yang diselesaikan	persen	100	650.000.000	
10.1	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus HI yang diselesaikan	Persen	100	650.000.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kasus HI yang diselesaikan	Persen	100	650.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	
10.1.1	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah perselisihan yang di cegah	perkar a	3	200.000.000	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah perselisihan yang di cegah	perkar a	3	200.000.000	
10.1.2	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	perkar a	3	250.000.000	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	perkar a	3	250.000.000	
10.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		jumlah lks tripartit yang di bina	lembag a	1	200.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		jumlah lks tripartit yang di bina	lembag a	1	200.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						865.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
11	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Jumlah transmigran yang telah difasilitasi pembinaannya	orang	40	765.000.000	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Jumlah transmigran yang telah difasilitasi pembinaannya	orang	40	765.000.000	
11.1	Kegiatan Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	orang	40	765.000.000	Kegiatan Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	orang	40	765.000.000	
11.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1	400.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1	400.000.000	

No	Rancangan RKPD						Hasil analisa kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sat	Target Capaian	Pagu Indikatif	
11.1.2	Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Lokal		jumlah calon transmigran dan/atau transmigran yang mendapatkan pelatihan	orang	20	365.000.000	Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Lokal		jumlah calon transmigran dan/atau transmigran yang mendapatkan pelatihan	orang	20	365.000.000	
12	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	paket	2	100.000.000	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	paket	2	100.000.000	
12.1	Kegiatan Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian		Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket	2	100.000.000	Kegiatan Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian		Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket	2	100.000.000	
12.1.1	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial,ekonomi dan kelembagaan	Lokasi	2	100.000.000	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial,ekonomi dan kelembagaan	Lokasi	2	100.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Tahun 2025 kami peroleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dengan mengundang Perangkat Daerah yang terkait tugas dan fungsi DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya dan organisasi kemasyarakatan.

Forum Perangkat Daerah tersebut diselenggarakan guna menerima saran dan masukan-masukan dari peserta untuk penyempurnaan rancangan awal Renja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Masukan-masukan yang diperoleh secara umum dapat disimpulkan bahwa para peserta berharap agar DPMPTSPTK meningkatkan kualitas pelayanan, mempromosikan potensi investasi kabupaten tasikmalaya.

Dari masukan tersebut, usulan Program/Kegiatan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Tasikmalaya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kabupaten Tasikmalaya			
1.1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				
1.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	64 orang	
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kabupaten Tasikmalaya			
2.1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				
2.1.1	Perluasan Kesempatan Kerja		jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja (padat karya)	2100 orang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 meruakan tahun transisi yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi struktural untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi

Sasaran pembangunan tahun 2025 adalah:

1. percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka dan (c) gini ratio
2. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2025, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2025 adalah Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Pertumbuhan Pusat-Pusat Ekonomi, Peningkatan infrastruktur dan daya saing produk pertanian dan Perikanan, Peningkatan Infrastruktur pariwisata dan Pengembangan Desa Wisata, Pemulihan dan Penumbuhan Ekonomi, Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah, Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial, Peningkatan

Daya Saing Olahraga dan Kepemudaan, Inovasi Pelayanan Publik dan Pengembangan Desa Mandiri.

Arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional tahun 2025 selanjutnya ditungkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP 2025, meliputi:

1. Pengurangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
4. Penguatan daya saing usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Percepatan pembangunan Ibu kota nusantara dan pelaksanaan pemilu 2024
7. Percepatan pembangunan Infrastruktur dasar dan konektivitas

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran Prioritas Nasional Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, akan dilakukan melalui tujuh Program Prioritas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya

RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan acuan DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya dalam penyusunan Renja Tahun 2025. Pada RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, telah dirumuskan tema pembangunan yaitu “**Pembangunan Infrastruktur dan Kondusivitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**”

Berdasarkan tema tersebut, terdapat 10 (sepuluh) sasaran prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Peningkatan pelayanan pendidikan
2. Peningkatan pelayanan kesehatan daerah serta penurunan angka prevalensi stunting
3. Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

4. Mitigasi dan penanggulangan bencana
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim
6. Peningkatan infrastruktur dan daya saing produk pertanian dan perikanan untuk menunjang ketahanan pangan
7. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro
8. Inovasi pelayanan publik
9. Peningkatan jumlah desa mandiri
10. Dukungan pelaksanaan pemilu dan pilkada

Dalam rangka mewujudkan peningkatan iklim investasi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran urusan penanaman modal seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
1	Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi
				Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal
				Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	IKM Pelayanan Perizinan
				Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan
				Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

Tabel 3.2
Tujuan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja PD Tahun 2025
1	Meningkatkan investasi daerah	Persentase Peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	5%

Tabel 3.3
Sasaran DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2025
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	67
2	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal	Rp. (juta) 170.148
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	IKM Pelayanan Perizinan	86,30
4	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	27,67%
5	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	6,25%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya yaitu meningkatkan daya saing daerah dalam menunjang kemudahan berusaha, telah ditetapkan sasaran melalui Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Meningkatnya realisasi penanaman modal, Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, Meningkatnya Kesempatan Kerja, Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Meningkatnya Jumlah Transmigran yang bersertifikat.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi umum dan pemeliharaan barang milik daerah.
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2026, penyediaan peta potensi dan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal.
- c. Program Promosi Penanaman Modal;
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah mengikuti acara pameran untuk mempromosikan potensi investasi Kabupaten Tasikmalaya.
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal;
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah MPP Digital, mengintegrasikan 18 perizinan kedalam Sistem Perizinan Elektronik Kabupaten Tasikmalaya (SPEKTA), pemantauan

pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan serta penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan.

- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada para pelaku usaha di Kabupaten Tasikmalaya.
- f. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan pengadaan sarana pelatihan kerja.
- g. Program Penempatan Kerja
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota.
- h. Program Hubungan Industrial
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.
- i. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- j. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.
- k. Program Perencanaan tenaga kerja
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penyusunan rencana tenaga kerja makro.

Rencana program dan kegiatan pada DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, yaitu:

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan
DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya

No	Sasaran PD	Nama Program/ Kegiatan	Target Indikator	
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Program:		
		1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Kegiatan:	
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	
			• Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan:	
			• Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 dokumen
			Kegiatan:	
			• Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan:	
			• Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen
			• Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen
		2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Kegiatan:	
			• Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan:	
			• Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen
3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
	Kegiatan:			
	• Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan:			
	• Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12 kegiatan usaha		
	• Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	150 pelaku usaha		
	• Pengawasan Penanaman Modal	55 kegiatan usaha		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan	Program:		
		1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Kegiatan:	

No	Sasaran PD	Nama Program/ Kegiatan		Target Indikator
			<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 	
			Sub Kegiatan:	
			<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 	2500 pelaku usaha
			<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 	50 pelaku usaha
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Kegiatan:	
			<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 	
			Sub Kegiatan:	
			<ul style="list-style-type: none"> Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 	1200 orang
			<ul style="list-style-type: none"> pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/kota 	1 unit
			Kegiatan:	
			<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta 	
			<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta 	27 lembaga
		2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Kegiatan:	
			<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 	
			Sub Kegiatan:	
			<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan antar Kerja 	3400 orang
			<ul style="list-style-type: none"> Perluasan Kesempatan Kerja 	2100 orang
		3	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
			Kegiatan	
			<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 	
			Sub Kegiatan	
			<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 	1 dokumen
4	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Kegiatan:	
			<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 	
			Sub Kegiatan:	
			<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 	1 perkara
			<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 	1 perkara
			<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 	1 lembaga
		2	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Kegiatan:	

No	Sasaran PD	Nama Program/ Kegiatan	Target Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 	
		Sub Kegiatan:	
		<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 	1 laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Transmigrasi 	10 orang
		3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
		Kegiatan:	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 	
		Sub Kegiatan:	
		<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman 	2 lokasi permukiman
5	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program:	
		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
		Kegiatan:	
		<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	
		Sub Kegiatan:	
		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 	3 dokumen
		<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	6 laporan
		Kegiatan:	
		<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	
		Sub Kegiatan:	
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 	60 orang
		Kegiatan:	
		<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 	
		Sub Kegiatan:	
		<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 	5 orang
		Kegiatan:	
		<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Umum Perangkat Daerah 	
		Sub Kegiatan:	
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 	12 paket
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 	12 paket
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 	12 dokumen
		<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Kunjungan Tamu 	12 laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	12 laporan
		Kegiatan:	
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	
		Sub Kegiatan:	
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 	12 laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	12 laporan
		Kegiatan:	

No	Sasaran PD	Nama Program/ Kegiatan		Target Indikator
			• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan:	
			• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34 unit
			• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit
			• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit

Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan Tahun 2025, yaitu:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
1	Inovasi Pelayanan Publik	Program:			
		1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	455.000.000	
			Kegiatan:		
			• Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	
			Sub Kegiatan:		
			Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha	55.000.000	DAU
			• Berbasis Resiko		
			Kegiatan:		
			Pembuatan Peta Potensi	400.000.000	
			• Investasi Kabupaten/Kota		
			Sub Kegiatan:		
			• Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DAU
			• Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	200.000.000	DAU
	2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	750.000.000		
		Kegiatan:			

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
		<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 	750.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 	750.000.000	DAU
		3 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	695.000.000	
		Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 	695.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 	220.000.000	DAK NON FISIK
		<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 	275.000.000	DAK NON FISIK
		<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Penanaman Modal 	200.000.000	DAK NON FISIK
		4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	420.000.000	
		Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 	420.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 	300.000.000	DAU
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 	120.000.000	DAU
2	Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan,	1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	6.500.000.000	
		Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 	6.450.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 	6.200.000.000	DAU dan DBHCHT

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
	koperasi dan usaha mikro	<ul style="list-style-type: none"> • pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/kota 	250.000.000	DAU
		Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta 	50.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta 	50.000.000	DAU
		2 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	11.817.836.636	
		Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 	11.817.836.636	
		Sub Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan antar Kerja 	500.000.000	DAU
		<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan Kesempatan Kerja 	11.317.836.636	DAU
		3 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	200.000.000	
		Kegiatan		
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 	200.000.000	
		Sub Kegiatan		
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 	200.000.000	DAU
		4 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	650.000.000	
		Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 	650.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 	200.000.000	DAU
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 	250.000.000	DAU
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 	200.000.000	DAU
		5 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	865.000.000	
		Kegiatan:		

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
		• Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	765.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		• Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	DAU
		• Pelatihan Transmigrasi	365.000.000	DAU
		6 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100.000.000	
		Kegiatan:		
		• Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	100.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		• Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	100.000.000	DAU
3	Inovasi Pelayanan Publik	Program:		
		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.868.814.144	
		Kegiatan:		
		• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145.000.000	DAU
		• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	DAU
		Kegiatan:		
		• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.000.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.000.000.000	DAU
		Kegiatan:		
		• Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	DAU
		• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.000.000	DAU
		• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	DAU
		• Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	DAU
		• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000	DAU

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
		Kegiatan:		
		• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.248.814.144	
		Sub Kegiatan:		
		• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	397.414.144	DAU
		• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	851.400.000	DAU
		Kegiatan:		
		• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.000.000	
		Sub Kegiatan:		
		• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	470.000.000	DAU
		• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	DAU
		• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.000.000	DAU

4.2 Program dan Kegiatan

Untuk memenuhi target indikator tujuan dan sasaran Renja DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya 2025, diwujudkan melalui program dan kegiatan. Program dan Kegiatan dirumuskan berdasarkan pertimbangan terhadap:

- a. Program Nasional;
- b. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;
- c. Pencapaian SDG'S;
- d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Rencana program yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar **Rp. 33.916.650.780,00** (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah). Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 4.3, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (2025)	Sumber Dana	Target Capaian	Pagu Indikatif (2026)	Ket
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					33.916.650.780			18.359.400.000	
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					11.383.814.144			6.685.000.000	
02.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP	Poin	76,50	9.063.814.144		77,00	6.685.000.000	
02.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSPK	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	175.000.000,00		9	235.000.000,00	
02.18.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	145.000.000,00	A P B D	3	200.000.000,00	
02.18.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	6	30.000.000,00	A P B D	6	35.000.000,00	
02.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya layanan administrasi keuangan	Bulan	14	6.000.040.648		14	6.000.000.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (2025)	Sumber Dana	Target Capaian	Pagu Indikatif (2026)	Ket
02.18.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	60	6.000.040.648	A P B D	60	6.000.000.000	
02.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya adminitrasi umum	Bulan	12	760.000.000		12	450.000.000	
02.18.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan/Paket	12	200.000.000	A P B D	12	250.000.000	
02.18.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan/Paket	12	140.000.000	A P B D	12	200.000.000	
02.18.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah dokumen dan bahan bacaan perundangundangan yang di sediakan	Dokumen	12	50.000.000	A P B D	12	60.000.000	
02.18.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Bulan/Laporan	12	50.000.000	A P B D	12	60.000.000	
02.18.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	320.000.000	A P B D	12	350.000.000	
02.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Bulan	12	1.248.773.496		12	1.249.400.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (2025)	Sumber Dana	Target Capaian	Pagu Indikatif (2026)	Ket
02.18.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	397.373.496	A P B D	12	398.000.000	
02.18.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	Laporan	12	851.400.000	A P B D	12	851.400.000	
02.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	12	880.000.000		12	1.000.000.000	
02.18.01.2.09.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	34	470.000.000	A P B D	12	500.000.000	
02.18.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	Unit	1	250.000.000	A P B D	1	300.000.000	
02.18.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	160.000.000	A P B D	12	200.000.000	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase kenaikan jumlah Investor	Persen	100	455.000.000		100	560.000.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (2025)	Sumber Dana	Target Capaian	Pagu Indikatif (2026)	Ket
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Fasilitas	1	55.000.000		1	60.000.000	
2.18.02.2.01.02	Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dokumen	1	55.000.000	A P B D	1	60.000.000	
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah peta potensi investasi	Dokumen	1	400.000.000		1	500.000.000	
2.18.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	200.000.000	A P B D	1	250.000.000	
2.18.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	200.000.000	A P B D	1	250.000.000	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal		Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	Pameran	5	750.000.000		5	750.000.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (2025)	Sumber Dana	Target Capaian	Pagu Indikatif (2026)	Ket
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	Kegiatan	2	750.000.000		2	750.000.000	
2.18.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	750.000.000	A P B D	2	750.000.000	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase pelaku usaha yang taat LKPM	Persen	16	695.000.000		18	800.000.000	
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha yang taat LKPM	Pelaku Usaha	11	695.000.000		11	800.000.000	
2.18.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	12	220.000.000	D A K	12	250.000.000	
2.18.05.2.01.02	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	250	275.000.000	D A K	250	300.000.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (2025)	Sumber Dana	Target Capaian	Pagu Indikatif (2026)	Ket
2.18.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	55	200.000.000	D A K	55	250.000.000	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal		Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	Jumlah Ijin	55	420.000.000		55	445.000.000	
2.18.04.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	persen	100	420.000.000		100	445.000.000	
2.18.04.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	2500	300.000.000	A P B D	2500	300.000.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (2025)	Sumber Dana	Target Capaian	Pagu Indikatif (2026)	Ket
2.18.04.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha	50	120.000.000	A P B D	50	145.000.000	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					21.667.836.636			5.450.000.000	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	Orang	1200	8.650.000.000		1200	2.350.000.000	
2.07.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah pencari kerja yang dilatih	Orang	1200	8.450.000.000		1200	2.250.000.000	
2.07.03.2.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Orang	1200	8.450.000.000	A P B D - D B H C H T	1200	2.000.000.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (2025)	Sumber Dana	Target Capaian	Pagu Indikatif (2026)	Ket
2.07.03.2.01.01.03	Sub kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/kota		Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	Unit	1	250.000.000	A P B D	1	250.000.000	
2.07.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	27	50.000.000		27	100.000.000	
2.07.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	27	50.000.000	A P B D	27	100.000.000	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	3377	12.117.836.636		3409	2.100.000.000	
2.07.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelayanan pembuatan kartu tanda bukti pencari kerja (AK.1)	Bulan	12	12.117.836.636		12	2.100.000.000	
2.07.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja		jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan akad, akl dan ulb	Orang	3377	500.000.000	A P B D	3409	100.000.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (2025)	Sumber Dana	Target Capaian	Pagu Indikatif (2026)	Ket
2.07.04.2.01.05	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja		jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Orang	368	11.617.836.636	A P B D,	368	2.000.000.000	
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kera		Tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja	Dokumen	1	200.000.000	-		200.000.000	
2.07.02.2.01	Kegiatan Penyusunan rencana tenaga kerja		jumlah dokumen rencana tenaga kerja	Dokumen	1	200.000.000			200.000.000	
2.07.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan rencana tenaga kerja makro		jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	Dokumen	1	200.000.000	A P B D		200.000.000	
2.07.05	Program Hubungan Industrial		Persentase kasus HI yang diselesaikan	Persen	100	650.000.000		100	800.000.000	
2.07.05.2.02	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus HI yang diselesaikan	Persen	100	650.000.000		100	800.000.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (2025)	Sumber Dana	Target Capaian	Pagu Indikatif (2026)	Ket
2.07.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah perselisihan yang di cegah	Perkara	1	200.000.000	A P B D	1	250.000.000	
2.07.05.2.02.02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perkara	1	250.000.000	A P B D	1	300.000.000	
2.07.05.2.02.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		jumlah lks tripartit yang di bina	Lembaga	1	200.000.000	A P B D	1	250.000.000	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					865.000.000			950.000.000	
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Jumlah transmigran yang telah difasilitasi pembinaannya	Orang	40	765.000.000		40	800.000.000	
3.32.03.1.01	Kegiatan Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	Orang	40	400.000.000		40	800.000.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (2025)	Sumber Dana	Target Capaian	Pagu Indikatif (2026)	Ket
3.32.03.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	365.000.000	A P B D	1	500.000.000	
3.32.03.1.01.06	Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Lokal		jumlah calon transmigran dan/atau transmigran yang mendapatkan pelatihan	Orang	10	100.000.000	A P B D	10	300.000.000	
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket	2	100.000.000		2	150.000.000	
3.32.04.1.01	Kegiatan Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian		Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket	2	100.000.000		2	150.000.000	
3.32.04.1.01.02	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial,ekonomi dan kelembagaan	Pemukiman	2	100.000.000	A P B D	2	150.000.000	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Komitmen dan dukungan dari seluruh Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSTK Kabupaten Tasikmalaya sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut dan guna terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak.

Haparan kami semoga Renja DPMPTSTK Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance dan peningkatan investasi di Kabupaten Tasikmalaya.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tasikmalaya


ds. SIKHA SOEPARIANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19710409 200212 1 005